

TAJUK RENCANA

Selamatkan Bangsa dengan Vaksinasi Ibu Hamil

MESKI terlambat, vaksinasi ibu hamil harus disambut dan diapresiasi. Disambut, karena ibu hamil merupakan kelompok yang rentan mengalami kondisi lebih buruk, termasuk anak di dalam kandungannya apabila terpapar Covid-19. Terlambat karena seperti diucapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PKC-PEN) Airlangga Hartarto, vaksinasi ibu hamil dibutuhkan untuk menjaga keselamatan generasi penerus Indonesia. (KR, 20/8).

Keterlambatan terjadi karena sejak awal ibu hamil memang belum menjadi prioritas dalam program vaksinasi di Indonesia. Pemerintah tentu tidak ingin gegabah dalam melakukan vaksinasi, sebelum ada uji kliniknya. Namun ketika angka kasus kematian ibu hamil – termasuk tenaga kesehatan yang hamil – yang tinggi, uji klinik pun diperluas pada ibu hamil. Setelah dinyatakan aman, perlindungan pun langsung diberikan.

Tidak bisa mengelak dari fakta yang terjadi. Dalam konferensi pers virtual, akhir Juli lalu Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PO-GI) Dr Ari Kusuma Januarto mengatakan berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kesehatan tercatat ada 2.179 ibu hamil yang meninggal. Tragisnya, 18% kematian di antaranya adalah akibat Covid-19. Sedang Kepala BKKBN Hasto Wadoyo mengungkap sejak Januari – April 2021 terdapat 536 ibu hamil terpapar Covid-19 dan 16 di antaranya tidak dapat diselamatkan. Artinya, setiap seribu ada 32 ibu hamil meninggal selama pandemi. Jika di luar masa pandemi itu setiap seribu ada tiga kematian ibu hamil. Ini meningkat 10 kali lipat. (medcom.id3, 19/3).

Maka gerak cepat pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah

memprioritaskan vaksinasi ibu hamil patut diapresiasi. Apalagi disebut Dekan FK-KMK UGM Prof dr Ova Emilia PhD bahwa akhir-akhir ini mortalitas ibu hamil meningkat, karena memang merupakan kelompok risiko tinggi. Maka vaksinasi 1.100 ibu hamil di DIY beberapa waktu lalu yang diselenggarakan UGM bekerja sama dengan pelbagai pihak mendapat perhatian serius. (KR, 20/8).

Meski tingginya angka kasus ibu hamil terpapar dan positif Covid-19 tentu tidak lepas dari tingginya kasus pada umumnya, apa yang disebut dr Ova bisa menjadi momentum mengevaluasi pendidikan kesehatan reproduksi, layanan ibu hamil, kegiatan posyandu dan lainnya. Meski Ketua POGI menyebut bila ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sebab secara imunitas, ibu hamil memiliki imunitas yang cenderung menurun. Tanpa vaksinasi, dikhawatirkan akan : berujung kematian atau anak terpaksa lahir premature.

Tentu, syarat dan ketentuan berlaku bagi ibu hamil untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Karena itu pahami dengan detail kehamilan dan kesehatan selama kehamilan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan layanan bagi ibu hamil bila terpapar Covid-19 mungkin dengan shelter atau rumahsakit khusus. Sehingga bila terjadi apa-apa bisa tertolong dengan cepat dan tepat. Karena tenaga kesehatannya pun secara khusus sudah disiapkan.

Sehingga mempercepat vaksinasi Covid-19 ibu hamil menjadi sebuah upaya cerdas memutus matarantai penularan Covid-19 yang masih tak berujung pangkal. Selain sekaligus mempercepat membangun *herd immunity*. Dan ini adalah sebuah keputusan tepat menyelamatkan perempuan dan juga masa depan bangsa. □

Dengan Pembelajaran Daring Tetap Berprestasi

PEMBELAJARAN daring yang tanpa tatap muka akan menguji sekolah di DIY untuk membuktikan, bahwa tanpa pertemuan langsung guru dan peserta didik di dalam kelas prestasi sekolah dapat dipertahankan. Karena itu pembelajaran daring harus dipersiapkan dengan baik dan dipandang sebagai sistem yang harus ditempuh. Asasi kegiatan belajar mengajar, mulai jadwal yang harus dipenuhi, ketercapaian program per mata pelajaran, hingga kontak-kontak langsung antara guru dengan peserta didik. Baik tentang pemecahan malah belajar hingga hubungan pribadi yang terkait di dalamnya agar dapat terlangsungkan dari kedua belah pihak.

Beruntunglah, bagi DIY dapat diyakini bahwa pembelajaran daring yang penuh tantangan tambah direcokkan situasi pandemi yang menyempitkan gerak langkah dalam menyiasati ketuntasan pembelajaran ini disadari benar oleh pihak sekolah. Dengn sebudi daya dan sekuat tenaga, setiap sekolah berusaha tetap menjiwai pembelajaran dengan tujuan memaksimalkan pencapaian program.

Kesadaran untuk tetap memegang teguh spirit DIY terdepan dalam pencapaian prestasi sekolah ini terasa sudah dijiwai seluruh stakeholder sekolah. Apalagi pihak berwenang selalu mengingatkan perlunya mempertahankan jati diri Yogyakarta sebagi kota pendidikan. Jangan sampai terjadi dengan bergulirnya sistem pembelajaran daring kehormatan yang predikatif ini digeser kota-kota lain.

Prestasi Sekolah

Mengingat kembali torehan prestasi sekolah di DIY yang antara lain tecermin lewat hasil Ujian Nasional (UN) terakhir yang dilaksanakan 2019 (mulai 2020 UN ditiadakan) prestasi DIY sungguh meyakinkan. Dengan mengambil rata-rata pencapaian nilai per individu siswa dalam satu sekolah pada jenjang SMP, secara nasional DIY

Nursisto

menyumbangkan lima sekolah terbaiknya untuk mendapatkan sepuluh kota. Kelima sekolah itu menempati komposisi puncak-puncak prestasi.

Di luar DIY terdapat satu wilayah dengan maksimal hanya mampu menghadirkan dua nama sekolah selebihnya untuk tiga wilayah lain masing-masing mencatatkan satu nama sekolah. Secara rinci kesepuluh sekolah berikut nilai rata-ratanya per



KR-JOKO SANTOSO

siswa sebagai berikut : SMP N 5 Yogyakarta (95, 26); SMP N 4 Pakem (94, 22); SMP N 115 Jakarta (93,78); SMP N 8 Yogyakarta (93, 61); SMP N 1 Surabaya (93,52); SMP N Godean , (93, 02); SMP N 255 Jakarta (92,06); SMP N 1 Magelang (92, 04); SMP N 1 Padang (91, 67) dan 10. SMP N 2 Bantul (91,66)

Dominasi DIY dalam dunia pendidikan yang sekaligus tecermin baik secara kualitas maupun kuantitas tadi menjadi pesan moral kepada seluruh warga sekolah di DIY. Agar semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun

Yang Hilang dari Pidato Presiden RI

PIDATO Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus lalu sarat dengan kata-kata pandemi, kesehatan, dan ekonomi. Yang justru hilang adalah kata-kata seperti hak asasi, korupsi, ketimpangan, kemiskinan, dan kematian.

Hilangnya kata-kata itu mencerminkan bahwa tidak ada kepentingan, apalagi suara, yang patut untuk disambungkan mengingat pandemi masih begitu mendominasi. Itu artinya, kata-kata selain pandemi dapat dengan mudah dihilangkan, bahkan jika perlu dibuang dari pikiran. Jadi, meski selalu bersedia mengemban amanat rakyat, namun tidak setiap orang Indonesia mampu menjadi ‘Penyambung Lidah Rakyat’ (Pelira) sebagaimana diamanatkan Bung Karno.

Amanat yang dikumandangkan dalam pidato 17 Agustus 1963 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi penanda yang bersejarah terhadap status dari para pemimpin Indonesia. Dengan status itu, para pemimpin telah menyatakan kisah hidupnya untuk selalu menyuarakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Dengan demikian, rakyat memang benar-benar merasa bahwa suara dan kepentingannya didengarkan. Sayangnya hal itu tidak mudah untuk ditemukan lagi, termasuk dalam pidato kenegaraan di atas.

Janji

Memang sulit untuk dibantah, saat ini kita sedang berada di tengah pandemi. Tapi apakah suara dan kepentingan rakyat hanya berhenti pada masalah ekonomi dan kesehatan belaka? Bukankah keduanya adalah hal yang menjadi tanggungjawab dari negara untuk mencukupinya? Maka, tidak perlu lagi untuk dikatakan di man-

A Windarto

apun dan kapanpun, lantaran tanggungjawab negara adalah mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Namun mengapa perwujudan dari ketiga cita-cita kebangsaan itu hanya menjadi slogan belaka? Dengan kata lain, kata-kata tampak lebih berkuasa daripada perbuatan. Akibatnya, terjadi beragam pelanggaran yang membuat janji-janji di masa lalu hanya tinggal sebagai kenangan belaka.

Contohnya, janji untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu justru semakin jauh dari kenyataan karena salah seorang dari pelanggarnya justru dianugerahi bintang jasa kenegaraan. Eurico Guterres adalah salah satu penerima bintang jasa itu. Padahal cukup jelas bahwa pelanggaran yang dilakukannya sesuai jajak pendapat di Timor-Timur tahun 1999 termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Inilah tragedi kemanusiaan yang lambat laun dilupakan, bahkan telah dibuang, dari pikiran.

Tentu, Timor-Timur sudah merdeka dan menjadi negara Timor Leste. Namun, jejak langkah pelanggaran HAM yang terjadi di pulau kecil itu sejak di-aneksasi rezim militer Orde Baru pada 1975 tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sepertiga dari penduduk di sana kehilangan nyawa akibat pendudukan sepihak dari penguasa di era Orde Baru. Lantas, tanpa rasa bersalah sedikitpun, penghargaan bintang jasa dianugerahkan kepada sosok yang terbukti mengarahkan dan melakukan pelanggaran HAM hanya karena

swasta terpenggil untuk mempertahankan keharuman nama melalui persembahan prestasi.

Setelah tanpa UN

Di luar tolak ukur nilai UN agar disadari, sangat terbuka luas bagi sekolah untuk menunjukkan prestasi dan mengangkat nama sekolah untuk menjadi yang terbaik pada tingkat kewilayahan lokal hingga nasional bahkan lebih luas lagi. Berbagai penelitian, memajukan nilai seni dan budaya, terampil berteknologi, memahirkan bidang bahasa, menghasilkan prestasi bidang olahraga, bidang agama, matang bermain musik dan masih banyak lagi bidang yang harus dipelajari. Semua bisa mengangkat nama baik sekolah yang harus ditempuh lewat pembelajaran yang berkualitas.

Sekolah pada umumnya sudah terpikirkan setelah tanpa UN mereka akan mematangkan bidang-bidang tertentu yang diunggulkan dalam pembelajaran daring ini. Sekalipun tanpa tatap muka langsung, pembelajaran daring yang dipersiapkan dengan baik berbekal kemauan dan kesadaran tinggi demi melahirkan banyak prestasi. Diyakini DIY akan tetap teruji berada di barisan terdepan. Sederet sekolah maju dalam berbagai penilaian pengganti UN secara nasional. □

*) **Nursisto**, mantan Kepala SMA N 3 Yogyakarta /Instruktur Nasional Manajemen Berbasis Sekolah.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirinkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Derap Langkah Kepanduan

GERAKAN Pramuka di Indonesia yang dulu dikenal dengan gerakan kepanduan sudah ada sejak 1912. Hal ini diawali munculnya kepanduan milik Belanda dengan nama *Nederlandsche Padvindere Organisatie* (NPO) yang kemudian pada 1916 berubah nama menjadi *Nederlands Indische Padvindere Vereniging* (NIVP). Pada tahun yang sama Mangkunegaran VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama *Javaansche Padvinder Organisatie* (JPO). Lahirnya JPO menjadi titik awal dari lahirnya gerakan kepanduan saat itu. Hal ini juga yang kemudian mendorong KH Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Wathan (HW) pada 1918. Di samping kepanduan yang digagas Kiai Dahlan pada saat itu terus bermunculan gerakan kepanduan di berbagai organisasi di antaranya Wira Tamtama di bawah Sarekat Islam, *Nationale Padvinderij* di bawah Budi Otomo dan Jong Java Mataram.

KH Ahmad Dahlan saat itu tertegun kala melihat anak-anak *Javansche Padvindere Organisatie* (JPO) yang sedang latihan berbasis di halaman pura Mangkunegaran. Sesampainya di Yogyakarta beliau membicarakan apa yang dilihatnya pada beberapa muridnya dan berharap Muhammadiyah juga mempunyai kepanduan dan dapat digunakan sebagai sarana dakwah dan ibadah.

Setelah melewati perjalanan panjangnya pasca kemerdekaan, pada 9 Maret 1961 bertempat di Istana Negara, Presiden Sukarno berpidato di hadapan sejumlah tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan di Indonesia. Peristiwa ini di kemudian hari diperingati sebagai hari Tunas Gerakan Pancasila. Selanjutnya pada 20 Mei 1961 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomer 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di samping dikenal seba-

gai Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei juga dikenal sebagai hari permulaan tahun kerja karena pada tanggal dan tahun tersebut pemerintah juga mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Keinginan pemerintah untuk meleburkan semua organisasi kepanduan yang ada di Indonesia ke dalam Gerakan Pramuka berlangsung di Istana Olahraga Nasional (Istora) pada 30 Juli 1961. Acara tersebut diikuti oleh wakil organisasi kepanduan yang ada di Indonesia kala itu. Selanjutnya pada 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan Mapimnas, Kwarnas dan juga Kwarnari. Acara yang berlangsung di Istana Negara ini diemeriahkan dengan defile pramuka sebagai bagian dari memperkenalkan Pramuka Indonesia ke masyarakat. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka dan dirayakan setiap 14 Agustus dengan berbagai macam kegiatan dari sekolah sampai dengan tingkat nasional.

Peran Gerakan Pramuka sebagai wahana pembentukan karakter terus dijalankan. Pramuka sebagai institusi pendidikan nonformal yang salah satu basis gerakannya adalah sekolah terus melakukan pembinaan bagi anggotanya, penanaman nilai karakter, membekali berbagai keterampilan serta peka terhadap realita sosial di sekitarnya. Hal inilah kemudian yang mendorong anggotanya untuk terlibat langsung dalam berbagai macam kegiatan. Sudah sangat sering kita lihat keterlibatan langsung Gerakan Pramuka dalam menangani bencana alam, melakukan bakti sosial bahkan di masa pandemi ini juga ikut andil dalam melakukan kampanye pencegahan penyebaran Covid-19.

Maju terus Gerakan Pramuka Indonesia. Selamat hari jadi ke-60 tahun terulash ‘Berkakti Tanpa Henti’. Kiprahmu dinanti negeri. □

*) **Alfian Dj**, Guru Muallimin Muhammadiyah Yogya.

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustui, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.